

PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Elidawaty Purba ¹⁾, Darwin Damanik ²⁾, Pandapotan Damanik ³⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, Pematang Siantar

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, Pematang Siantar

³⁾ Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Pematang Siantar

¹⁾ elidawatypurba19@gmail.com

²⁾ darwin.damanik@gmail.com

³⁾ pandam.siantar@gmail.com

Korespondensi author: darwin.damanik@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [06 Desember 2023]

Accepted [19 Desember 2023]

Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Keuangan Daerah, Ekonomi Publik.

Keywords: Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, Regional Expenditures, Regional Finance, Public Economy.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Pematang Siantar baik secara parsial dan simultan. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis data regresi linier berganda ordinary least square, dengan data sekunder yang didapatkan dari BPS Kota Pematang Siantar. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial, Dana Bagi Hasil (X1) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Pematang Siantar, Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Pematang Siantar; Secara simultan, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Pematang Siantar.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of Profit Sharing Funds and General Allocation Funds on Pematang Siantar City Regional Expenditures both partially and simultaneously. The research method uses quantitative research and ordinary least square multiple linear regression data analysis techniques, with secondary data obtained from BPS Pematang Siantar City. The results of this research are that partially, the Profit Sharing Fund (X₁) has a significant effect on regional expenditure in the City of Pematang Siantar, the General Allocation Fund (X₂) has a significant effect on the regional expenditure of the City of Pematang Siantar; Simultaneously, Profit Sharing Funds and General Allocation Funds have a significant influence on regional expenditure in Pematang Siantar City.

1. PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau retribusi, biaya yang dikenakan atas jasa publik, laba perusahaan milik Negara, maupun sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlatar belakang hal tersebut, sektor publik diharapkan dapat mengelola keuangan negara dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal.

Kontrol terhadap penggunaan dana publik wajib dilakukan. Seperti di sektor swasta, cara untuk mengontrol tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun anggaran. Dalam sektor publik, anggaran yang disusun bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah daerah. Anggaran tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus disusun dengan sungguh-sungguh dan tidak semata-mata sebagai formalitas. Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh pendapatan terhadap belanja daerah. Beberapa diantaranya juga menguji kecenderungan pemerintah daerah yang lebih menggantungkan diri pada transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum/DAU) dibandingkan berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH). Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap* dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU tidak akan sama besarnya kepada setiap daerah. Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah rendah maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang tinggi dan sebaliknya daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah tinggi maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang rendah. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Seluruh sumber pendapatan daerah yang diperoleh akan dipergunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru karena tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Selain itu daerah juga sangat bergantung pada pemerintah pusat. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan ternyata justru digunakan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah.

Realisasi penerimaan daerah Kota Pematang Siantar selama 5 tahun belakangan ini selalu mengalami perubahan terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi realisasi pengeluaran daerah melalui Belanja Daerah pada periode 2020-2022 selalu mengalami peningkatan yang disebabkan dari pemulihan ekonomi nasional akibat dari pandemik covid 19 di tahun 2020 lalu.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Daerah Kota Pematang Siantar, 2018-2022

No	Tahun	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Belanja
1.	2018	58310620700	188366544385	994512015480.57
2.	2019	19548529650	616196680000	935104715008.32
3.	2020	28182906083	565804258000	824200128276.60
4.	2021	21624828000	575194109000	837306841176.38
5.	2022	26583550000	556772164000	885629154464.02

Sumber data: Laporan Keuangan Kota Pematang Siantar, 2023

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana alokasi umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) bersifat (*Black Grant*)” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

b. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (UU No. 33 tahun 2004, pasal 1 ayat 20). Penjelasan umum UU No. 32 tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian dana bagi hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

Tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal menjelaskan, dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

c. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16 menyatakan, sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam angka pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah

Hubungan keuangan pusat dan daerah, pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan. Terutama hak mengambil keputusan mengenai anggaran, yaitu bagaimana memperoleh dan membelanjakannya. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang di tetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja urusan pilihan, terdiri dari pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Tim Asistensi menteri keuangan bidang desentralisasi fiskal mengatakan, desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi di sisi pengeluaran. Hal ini berarti dana besar yang telah di transfer akan dikelola oleh daerah dengan diskresi yang cukup luas dalam penggunaannya. Sudah seharusnya belanja daerah akan lebih banyak memberikan warna dalam konsolidasi belanja pemerintah secara nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional dan perekonomian nasional juga akan dipengaruhi oleh pola belanja daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset. Dimana Kantor BPKA berada di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar. Penelitian ini dimulai pada Bulan Pebruari sampai Mei 2023. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif jenis kuantitatif. Menurut Purba *et al.* (2021:96) metode kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu variabel bebas (*Independent Variabel*) dan variabel terikat (*Dependent Variabel*).

- a. Variabel bebas (*Independent Variabel*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel tidak bebas/terikat. Variabel bebasnya adalah dana bagi hasil (X_1) dan dana alokasi umum (X_2).
- b. Variabel terikat (*Dependent Variabel*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikatnya adalah belanja daerah (Y).

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional
Dana Bagi Hasil (X_1)	Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum (X_2)	Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Belanja Daerah (Y)	Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai penunjang nilai kekayaan bersih adalah periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Regresi Linear Berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh dana bagi hasil (X_1) dan dana alokasi umum (X_2) terhadap belanja daerah (Y). Untuk menguji hipotesis tersebut, maka persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_t$$

Keterangan:

- Y = Belanja Daerah (*dependen*)
- α = Konstanta dari keputusan regresi
- e_t = error term
- β_1 = Koefisien regresi dari variabel X_1
- β_2 = Koefisien regresi dari variabel X_2
- X_1 = Dana Bagi Hasil (*independen*)
- X_2 = Dana Alokasi Umum (*independen*)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

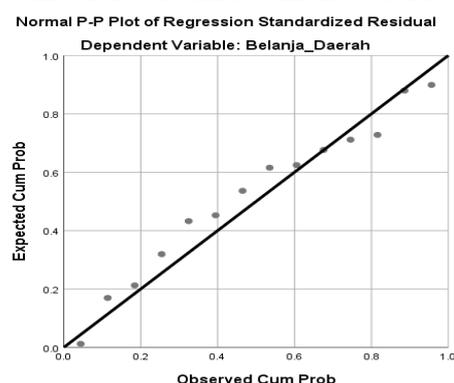
Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji klasik yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji linieritas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel *dependen* dan variabel *independen* mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan *Grafik Normal P-P Plot* dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal.. Adapun Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Normalitas P-Plot



Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa *grafik normal P-Plot* menunjukkan jika sebaran data berada pada posisi disekitar daerah garis lurus dan mengikuti garis diagonal yang membentuk garis miring dari arah kiri ke kanan atas yang menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Tabel 3. Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.89216332
Most Extreme Differences	Absolute	.221
	Positive	.221
	Negative	-.133
Test Statistic		.221
Asymp. Sig. (2-tailed)		.184 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asiymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,184 > 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Tujuan digunakannya uji multikolinieritas dalam penelitian adalah untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar Variabel bebas (*Independent*) dalam suatu model regresi linier berganda. Model regresi yang baik seharusnya “tidak terjadi” korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolarence*.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DBH	.551	1.813
	DAU	.551	1.813

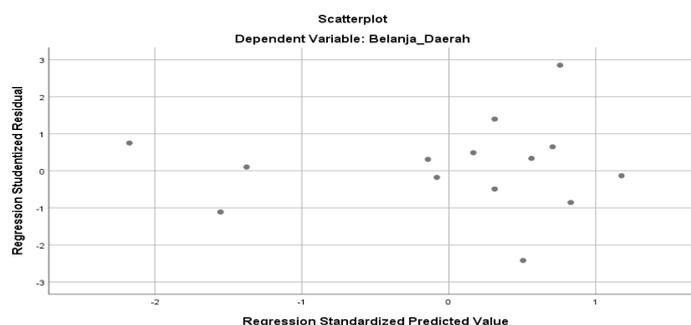
a. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 diatas, pada bagian "*Collinearity Statistics*" diketahui nilai *Tolerance* untuk setiap variabel DBH dan DAU sebesar 0,551 lebih besar dari 0,10. Sementara, nilai VIF untuk setiap variabel DBH dan DAU sebesar 1,813 lebih kecil dari 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi di penelitian ini.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar analisis *scatter plot* adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak membentuk pola atau jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, berarti terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 2 diatas, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah sekitar angka 0 dan menyebar secara acak dan merata diatas sumbu X dan Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

4) Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test For Linearity* pada taraf signifikansi 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah
ANOVA Table

			Sig.
Belanja * DBH	Between Groups	(Combined)	.074
		Linearity	.026
		Deviation from Linearity	.147

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 dalam pengambilan keputusan uji linearitas diperoleh nilai *Sig. Deviation from Linearity* pada variabel dana bagi hasil (DBH) sebesar $0,147 > 0,05$ artinya dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang linier dan dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara DBH terhadap belanja daerah.

Tabel 6. Hasil Uji Linieritas

			Sig.
Belanja * DAU	Between Groups	(Combined)	.070
		Linearity	.055
		Deviation from Linearity	.183

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6. dalam pengambilan keputusan uji linearitas diperoleh nilai *Sig. Deviation from Linearity* pada variabel DAU sebesar $0,183 > 0,05$ artinya dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang linier dan dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara DAU terhadap belanja daerah.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel, bisa dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear.

Tabel 7. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	417756238310.143		2.066	.063					
	DBH	17.704	.941	4.824	.001	.164	.824	.699	.551	1.813
	DAU	1.443	1.160	5.948	.000	.530	.873	.862	.551	1.813

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel DBH sebesar 17,704 dan variabel DAU sebesar 1,443 dengan konstanta sebesar 417756238310.143 sehingga model persamaan regresi yang di peroleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 417756238310.143 + 17,704 X_1 + 1,443 X_2$$

Koefisien-koefisien hasil dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 417756238310.143 hal tersebut dapat menjelaskan bahwa, jika variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan nol, maka Belanja daerah (Y) bernilai 417756238310.143.
- Nilai koefisien DBH (X_1) sebesar **17,704** berarti jika dana bagi hasil kurang dari 1%, maka dana bagi hasil akan mengalami sebesar 0,443%. Dana bagi hasil bernilai positif, maka dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Apabila dana bagi hasil naik 1% maka jumlah belanja daerah akan naik dari sebesar 0,443%.
- Nilai koefisien DAU (X_2) sebesar 2,377, berarti jika dana alokasi umum mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah ikut naik sebesar 2,377. Dana alokasi umum bernilai positif, maka dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Semakin besar dana alokasi umum maka semakin meningkat belanja daerah.

Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel *independent* secara individual dalam menerangkan variabel *dependent*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Coefficients ^a	
	t	Sig.
1	(Constant)	2.066 .063
	DBH	4.824 .001
	DAU	5.948 .000

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data primer diolah, 2023

Besarnya angka t_{tabel} dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k-1$ yang berarti $14-2-1=11$, sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,812. Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t (parsial) variabel DBH (X_1) terhadap Belanja daerah (Y) diperoleh nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 4,824 dan t_{tabel} sebesar 1,812 maka ($4,824 > 1,812$) sehingga dapat dinyatakan bahwa DBH (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

b. Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t (parsial) variabel DAU (X_2) terhadap Belanja daerah (Y) diperoleh nilai signifikan ($0,001 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 5,948 dan t_{tabel} sebesar 1,812 maka ($5,948 > 1,812$) sehingga dapat dinyatakan bahwa DAU (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

2) Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah di Kota Pematang Siantar secara simultan.

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	311012935094093240000000.000	2	155506467547046620000000.000	18.331	.000 ^b
	Residual	93318258759011900000000.000	11	8483478069001081000000.000		
	Total	404331193853105100000000.000	13			

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

b. Predictors: (Constant), DAU, DBH

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 18,331 dengan signifikan 0,000 < 0,00 dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut memenuhi kriteria yang menyatakan bahwa hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah di Kota Pematang Siantar.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinansi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.877 ^a	.769	.727	92105798237.68470	1.817

a. Predictors: (Constant), DAU, DBH

b. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 10 diatas hasil Nilai koefisien determinasi diketahui berpengaruh dari variabel *independent* (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) terhadap variabel *dependent* (belanja daerah) yang dinyatakan dalam nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,769 (76,9%). Artinya bahwa sebesar 76,90% variabel *independent* (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dapat menjelaskan variabel *dependent* (belanja daerah). Sementara sebesar 23,10% dijelaskan oleh variabel *independent* lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

1. Analisis Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Hal ini diperkuat dan didukung dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 4,824 dan t_{tabel} sebesar 1,812 maka ($4,824 > 1,812$). Maka hipotesis yang menyatakan secara parsial DBH terhadap Belanja daerah di Kota Pematang Siantar ditolak.

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa nilai DBH (Dana Bagi Hasil) Kota Pematang Siantar pada khususnya sudah baik dan nilai Belanja Daerah Kota Pematang Siantar pada khususnya juga sudah baik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang linier antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi Dana Bagi Hasil semakin tinggi pula Belanja Daerah.

2. Analisis Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Hal ini diperkuat dan didukung dari nilai ($0,001 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 5,948 dan t_{tabel} sebesar 1,812 maka ($5,948 > 1,812$). Maka hipotesis yang menyatakan secara parsial DAU terhadap Belanja daerah di Kota Pematang Siantar ditolak.

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa nilai Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Pematang Siantar pada khususnya sudah baik dan nilai Belanja Daerah Kota Pematang Siantar pada khususnya juga sudah baik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang linier antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi Dana Alokasi Umum semakin tinggi pula Belanja Daerah.

3. Analisis Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara serentak (simultan) berpengaruh positif terhadap Belanja daerah di Kota Pematang Siantar. Hal ini diperkuat

dan didukung dari nilai signifikansi F_{hitung} sebesar 18,331 > F_{tabel} sebesar 4,10 dengan signifikan $0,000 < 0,00$. Maka hipotesis yang menyatakan secara simultan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja daerah di Kota Pematang Siantar dapat diterima.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial, Variabel dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah di Kota Pematang Siantar.
2. Secara Parsial, Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah di Kota Pematang Siantar.
3. Secara simultan, Variabel dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah di Kota Pematang Siantar
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja daerah sebesar 0,769 (76,9%). Artinya bahwa sebesar 76,90% variabel *independent* (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dapat menjelaskan variabel *dependent* (belanja daerah). Sementara sebesar 23,10% dijelaskan oleh variabel *independent* lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ernayani, Rihfenti. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*. Universitas Balikpapan. Diakses April 2022.
- Fadilah, Haris. 2020. *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia*. Universitas Negeri Padang. Diakses April 2022.
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Universitas Jember. Diakses Mei 2022.
- Manullang & Siregar. 2014. *Melakukan Penelitian Menggunakan Program SPSS*. Medan : Universitas Simalungun.
- Marsuki. 2014. *IQ GPM – Kualitas Kecerdasan Intelektual Generasi Pembaru Masa Depan*. Malang : Universitas Brawijaya Pers (UB Pers).
- Mulyati, Sri. 2018. *Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh*. Universitas Malikussaleh. Diakses April 2022.
- Nurdini, Rini. 2015. *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*. Universitas Jenderal Soedirman. Diakses April 2022.
- Peraturan Pemerintah Daerah RI No. 104 tahun 2006.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
- Pratama, Anggi. 2018. *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai*. Universitas Pembangunan Panca Budi. Diakses Mei 2022.
- Purba, E. et al. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Rachmawati, Laila. 2016. *Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah*. STIE Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta. Diakses April 2022.
- Rasyid, Moh. 2019. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah*. Universitas Tadulako. Diakses April 2022.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.